

ANALISIS PENGARUH KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA INSPEKTORAT KABUPATEN ENDE

Fransiskus Marlon Reu^{1*}, Hipolitus Pegu Pula Doja²

^{1,2} Politeknik Negeri Kupang

*E-mail: Marlon.reu1997@gmail.com

Abstract

In order to realize an effective, efficient, transparent, and accountable government and free from all practices of corruption and nepotism in the government of Ende Regency. The government must have three main aspects that support the creation of good governance, namely supervision, control, and inspection. The existence of mutations between work units causes experienced officers to be replaced by inexperienced ones. In addition, the population of only 274,599 thousand causes close interpersonal relationships, whether kinship or other interests. This also affects the independence of the Ende district inspectorate apparatus. Competence and independence are standards that must be met by an auditor to be able to conduct an audit properly. The purpose of this study to determine the competence and independence of auditors can affect audit quality. Data collection techniques used are questionnaires and multiple linear regression data analysis techniques using SPSS 21.0 data statistics application. The results of this study indicate the influence of competence and independence of auditors on audit quality simultaneously and partially.

Keywords: Competence, Independence, Audit Quality

PENDAHULUAN

Dalam rangka untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta bersih dari segala praktik korupsi dan nepotisme, pemerintah telah mengamanatkan di dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 untuk dapat mencapai suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) maka perlu adanya suatu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan sudah dilaksanakan dengan baik. Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah menyatakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan fungsi dan kewenangannya

Salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah inspektorat daerah. Menurut Tamurung et al (2019), inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal. Audit internal adalah

audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi (Mardiasmo, 2005). Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Audit pemerintahan merupakan salah satu elemen penting dalam penegakan *good government*. Namun demikian, praktiknya sering terjadi kesalahan. Mardiasmo (2006) menjelaskan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam audit pemerintahan di Indonesia, di antaranya tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar pengukur kinerja pemerintahan baik pemerintah pusat maupun daerah dan hal tersebut umum dialami oleh organisasi publik karena output yang dihasilkan yang berupa pelayanan publik tidak mudah diukur. Dengan

kata lain kualitas masih diperdebatkan.

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008, pengukuran kualitas audit atas laporan keuangan, khususnya yang dilakukan oleh APIP, wajib menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang tertuang dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Auditor harus memiliki dan meningkatkan pengetahuan mengenai metode dan teknik audit serta segala hal yang menyangkut pemerintahan seperti organisasi, fungsi, program, dan kegiatan pemerintahan.

Selain keahlian audit, seorang auditor juga harus memiliki independensi dalam melakukan audit agar dapat memberikan pendapat atau kesimpulan yang apa adanya tanpa ada pengaruh dari pihak yang berkepentingan. Adanya independensi akan mendapat kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan auditan (Lastanti, 2005). Pada pernyataan standar umum kedua SPKN Dan juga dijelaskan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 56 menjelaskan bahwa Aparat pengawasan intern pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus independen dan obyektif. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian ini. Dimana tempat yang dijadikan obyek adalah Dinas Inspektorat Kabupaten Ende. Alasan peneliti memilih Dinas Inspektorat Kabupaten Ende sebagai tempat penelitian adalah karena yang pertama Aparat Inspektorat Kabupaten Ende merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berada di Kabupaten Ende; Kedua, peneliti ingin menguji kompetensi dan independensi auditor di Inspektorat kabupaten Ende.

Untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas public dan *good governance*, diperlukan adanya pemeriksaan. Mardiasmo (2005) mengemukakan bahwa pemeriksaan (*audit*) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan independensi untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan auditor internal pemerintah daerah yang melakukan fungsi audit pada pemerintah daerah. Peneliti ingin menguji kembali penelitian Alim et al (2007) dan Efendy (2010) tentang Kompetensi dan Independensi terhadap Kualitas Audit.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit aparat inspektorat.

H₂: Independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit aparat inspektorat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan Pada Inspektorat Kabupaten Ende. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, karena penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel dengan melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang mengkalkulasikan data-data angka sebagai pembahasan. Data angka tersebut dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan alternatif jawaban skala likert. Analisis data menggunakan prosedur statistik data dengan bantuan program SPSS 21.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Menurut Sugiyono (2017) data kuantitatif adalah data penelitian yang berkaitan dengan angka. Data kuantitatif penelitian ini berupa kuensioner yang disebarkan ke responden pada Inspektorat Kabupaten Ende. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Dinas Inspektorat Kabupaten Ende, yang bertindak sebagai auditor berjumlah 38 orang.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2017) sampling jenuh merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dikarenakan populasi yang digunakan pada penelitian ini relatif kecil atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Jadi, sampel yang diteliti sebanyak 38 orang.

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data adalah dengan menggunakan metode observasi, dokumentasi dan juga kuisoner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuisoner kepada responden dengan mendatangi

langsung lokasi penelitian dengan jumlah responden 38, jumlah 38 responden ini adalah pegawai di Inspektorat Kabupaten Ende. Proses pendistribusian hingga pengumpulan data dilakukan pada tanggal 6 november - 24 november 2020. Dari 38 kusioner yang disebarkan semuanya diterima kembali, dari jumlah kusioner tersebut tidak ada yang cacat dan terisi semua, sehingga kusioner yang dapat diolah lebih lanjut sebanyak 38 eksemplar.

Sebelum data dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis regresi berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari: uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2006). Untuk Uji K-S yakni jika nilai hasil Uji K-S > dibandingkan taraf signifikansi 0,05 maka sebaran data tidak menyimpang. Hasilnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 1. Uji Normalitas

N	Sig	Keterangan
38	.565	Terdistribusi Normal

Multikolinieritas adalah suatu keadaan dimana variabel lain (*independen*) saling berkorelasi satu dengan yang lainnya. Persamaan regresi berganda yang baik adalah persamaan yang bebas dari adanya multikolinieritas antara variabel *independen*. VIF (*Variance Inflation Factor*) adalah alat uji yang digunakan untuk mengukur ada tidaknya variabel yang berkorelasi. Jika $VIF < 10,00$ dan nilai tolerance $> 0,10$ maka tidak terjadi gejala Multikolinieritas dan jika $VIF > 10,00$ dan nilai tolerance $< 0,10$ maka terjadi gejala Multikolinieritas (Ghozali, 2006). Berikut tabel Uji Multikolinieritas adalah sebagai berikut;

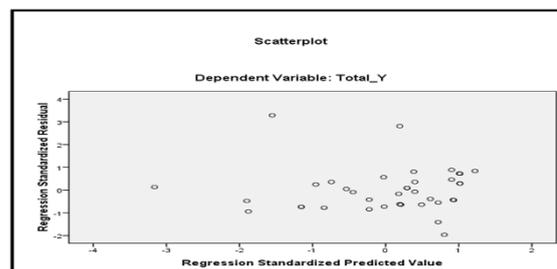
Tabel 2. Uji Multikolinearitas

No	TOL	VIF
X1	.868	1.152
X2	.868	1.152

Dari hasil tabel diatas, terlihat bahwa dari kedua variabel *independen* dengan nilai VIF $1,152 < 10,00$ dan nilai *Tolerance* $0,868 > 0,10$ sehingga dapat disimpulkan dalam model regresi ini tidak ada masalah.

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Jika varian dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homoskedastisitas, dan jika varian berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut adalah gambar untuk melihat ada atau tidak adanya heteroskedastisitas



Gambar 1. Uji Hetero

Dengan demikian maka pada grafik diatas menunjukkan tidak ada pola yang jelas dan menandakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas untuk variabel penelitian, sehingga asumsi dasar bahwa variasi residual sama untuk semua pengamatan terpenuhi.

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit. Analisis regresi linear berganda yang digunakan diformulasikan sebagai berikut. (Sugiyono, 2017). Hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Sig	Keterangan
Constant	U	
X1	.001	Diterima
X2	.000	Diterima

Berdasarkan tabel 3 diatas diketahui bahwa pada variabel kompetensi diperoleh nilai sig 0,001, berarti $p < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_1 diterima, artinya kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit.

Variabel independensi diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,000, jika dibandingkan dengan level of significant 0,05, berarti $p < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_2 diterima, artinya independensi berpengaruh terhadap kualitas audit.

Pengaruh Kompetensi Auditor (X1) Terhadap Kualitas Audit (Y)

Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil uji t variabel kompetensi terhadap variabel kualitas audit dengan nilai signifikansinya $0,001 < 0,05$. Artinya auditor harus memiliki

kompetensi untuk melaksanakan audit dengan benar, semakin tinggi kompetensi yang dimiliki auditor maka semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkan.

Untuk meningkatkan kualitas audit diperlukan adanya peningkatan kompetensi auditor, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan yang memadai serta keahlian khusus di bidangnya. Standar audit APIP disebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh orang yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. Dengan demikian, auditor belum memenuhi persyaratan jika ia tidak memiliki pendidikan dan pengalaman yang memadai dalam bidang audit. Dalam audit pemerintahan, auditor dituntut untuk memiliki dan meningkatkan kemampuan atau keahlian bukan hanya dalam metode dan teknik audit, akan tetapi segala hal yang menyangkut pemerintahan seperti organisasi, fungsi, program, dan kegiatan pemerintah. Kompetensi yang diperlukan dalam proses audit tidak hanya berupa penguasaan terhadap standar akuntansi dan auditing, namun juga penguasaan terhadap objek audit. Selain dua hal di atas, ada tidaknya program atau proses peningkatan keahlian dapat dijadikan indikator untuk mengukur tingkat kompetensi auditor.

Pengaruh Independensi Auditor (X2) Terhadap Kualitas Audit (Y).

Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil uji t variabel independensi terhadap variabel kualitas audit dengan nilai signifikansinya $0,000 < 0,05$. Artinya semakin baik independensi seorang auditor akan semakin baik kualitas audit.

Dalam melaksanakan audit auditor harus memiliki independensi dalam mempertimbangkan fakta dan bukti audit yang ditemukan, sehingga hasil audit menyatakan keadaan yang sebenarnya dan terbebas dari tekanan-tekanan dari dalam maupun dari luar. independensi dalam pengauditan sebagai "Penggunaan cara pandang yang tidak bias dalam pelaksanaan pengujian audit, evaluasi hasil pengujian tersebut, dan pelaporan hasil temuan audit". Sedangkan Mayangsari (2003) mendefinisikan independensi sebagai "keadaan yang tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugas. Akuntan publik yang independen haruslah akuntan publik yang tidak terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam pemeriksaan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan yaitu, Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini dinyatakan berdasarkan data yang diambil dan diolah oleh peneliti menggunakan uji t yang menghasilkan variabel kompetensi berpengaruh terhadap variabel kualitas audit dengan nilai signifikansinya $0,001 < 0,05$. Artinya auditor harus memiliki kompetensi untuk melaksanakan audit dengan benar, semakin tinggi kompetensi yang dimiliki auditor maka semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkan. Untuk meningkatkan kualitas audit diperlukan adanya peningkatan kompetensi auditor, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan yang memadai serta keahlian khusus di bidangnya. Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini dinyatakan berdasarkan data yang diambil oleh peneliti lalu diolah menggunakan uji t yang menghasilkan variabel independensi berpengaruh terhadap variabel kualitas audit dengan nilai signifikansinya $0,000 < 0,05$. Artinya semakin baik independensi seorang auditor akan semakin baik kualitas audit. Dalam melaksanakan audit auditor harus memiliki independensi dalam mempertimbangkan fakta dan bukti audit yang ditemukan, sehingga hasil audit menyatakan keadaan yang sebenarnya dan terbebas dari tekanan-tekanan dari dalam maupun dari luar.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas adapun saran yang dapat diberikan yaitu Diharapkan auditor dapat meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan auditing sehingga kompetensi yang dimiliki auditor tersebut sesuai dengan APIP dan perkembangan lingkungan pengawasan. Selain itu seorang auditor harus menjaga independensinya dalam kenyataan yang ditunjukkan dengan tidak terpengaruh dengan pihak manapun pada saat membuat laporan pemeriksaan. Seorang auditor juga harus menjaga independensinya dalam penampilan yang ditunjukkan dengan tidak ada hubungan tertentu antara auditor dengan auditee.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, Nizarul, Trisni, Hapsari, dan Purwanti Liliak. (2007). Pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi. *Simposium Nasional*

Akuntansi X. Makassar.

<https://doi.org/10.35794/emba.v7i3.24906>

- Efendy, M. Taufiq. (2010). *Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah*. Thesis. Universitas Diponegoro Semarang:
- Ghozali, Imam. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang : UNDIP.
- Lastanti, H. S. (2005). Tinjauan terhadap kompetensi dan independensi akuntan publik: Refleksi atas skandal keuangan. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 5(1), 85-97. <https://doi.org/10.25105/mraai.v5i1.2791>
- Mardiasmo. (2006). Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. 2 (1).
- Mardiasmo. (2005). *Akuntansi Sektor Publik* Edisi 2. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mayangsari, Sekar. 2003. Pengaruh Keahlian dan Independensi terhadap Pendapat Audit: Sebuah Kuasiekserimen. *Jurnal Riset Akuntan Indonesia*. 6 (1). <http://doi.org/10.33312/ijar.88>
- Permendagri Nomor 64 Tahun 2007, Tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV
- Tumurang, D. O., Ilat, V., & Kalalo, M. Y. (2019). Pengaruh Self Efficacy, Kompleksitas Tugas Dan Keahlian Audit Terhadap Audit Judgment Auditor Pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 7(3). 3919-3928.